



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mewajibkan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan Perencanaan pembangunan daerah

dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat untuk jangka waktu lima tahun (2021-2026) akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Dimana program dan kegiatan mengacu pada Kemendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang juga dipedomani oleh Kementerian Pertanian RI dan Provinsi.

Selanjutnya, Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan

dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor

- 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/ /BUP-PASBAR/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan fungsi perencanaan pembangunan daerah di setiap bidang, baik Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sarana dan Prasarana Pertanian, Penyuluh Pertanian.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, responsif, partisipatif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai wujud dari upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 : *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 : *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.
- 1.3 : *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 : *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 : *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 : *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 : *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 : *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 : *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 : *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 : *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD
- 3.3 : *Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 14 (Empat belas) Kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 memuat pencapaian target kinerja tahun 2023 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2022. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada umumnya realisasi program/kegiatan sudah mencapai target Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi produksi padi pada tahun 2022 tidak mencapai terget hal disebabkan karena adanya luas baku sawah yang menurun dari 9.157 Ha menjadi 8.873 Ha selain itu terjadi alih fungsi lahan dari sawah ke komoditi lain misalnya di Kecamatan Kinali karena kurangnya pasokan air untuk sementara lahan sawah ditanami tanaman hortikultura.

Untuk komoditi jagung pada tahun 2022 produksinya sedikit menurun terdapat integrasi dengan sawit yang umurnya kurang dari 2 tahun. Namun jika sawit sudah berumur 2 tahun maka tidak bisa lagi ditanami jagung. Selain itu benih tidak tersedia dan pupuk mahal.

Produksi cabe tahun 2022 jauh dari target hal ini disebabkan iklim yang ekstrim seperti di Luhak Nan Duo hasil kurang maksimal, terjadi banjir di Ranah Batahan. Selain itu petani banyak yang menggunakan bibit turunan varietas lokal sehingga rentan terserang hama penyakit (antraknus dan layu fusarium).

Dapat diambil kesimpulan bahwa dari realisasi capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan interval nilai realisasi kinerja dikategorikan tinggi dengan nilai 87%.

TABEL 2.2.(TC.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026		RealisasiTarget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) (2021)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				(Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahunn-1) (AKUMULASI 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				128.096.101.917		14.530.617.490		17.044.845.612		16.760.958.051		28.729.264.805		53.961.855.304		42,13
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (ton) komoditas:		48.648.633.500		1.333.987.010		1.654.230.500		1.035.273.380				3.920.498.795		8,06
		Padi	126.007		109.883		117.343		95.753	-	119.980		119.980	-	95,22	
		Jagung	299.752		271.047		283.005		222.855	-	287.556		287.556	-	95,93	
		Cabai	9.828		9.591		9.648		5.223	-	9.693		9.693	-	98,63	
		Jeruk	10.420		14.579		9.888		7.027	-	9.892		9.892	-	94,93	
		Alpukat	5.396		17.141		3.396		12.618	-	3.896		3.896	-	72,20	
		Padi	4,90		4,8		4,70		4,8	-	4,75		4,8	-	97,96	
		Persentase ketersediaan bibit ternak (%)	31		26%		27%		27	-			27%	-	0,87	

		Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak (%)	45		15%		20%		20	-			20%	-	0,44	
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)	212	17.979.280.000	119	296.737.141	30	235.500.000	30	870.224.780	35	1.511.336.725	35	2.768.298.646	16,51	15,40
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1. Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian	12	11.813.730.000	12	93.108.000	12	90.000.000	25	600.644.850	12	1.274.463.985	12	2.058.216.835	70,00	17,42
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1. Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12	6.165.550.000	12	203.629.141	12	145.500.000	25	269.579.930	12	236.872.740	12	710.081.811	70,00	11,52
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan	Jumlah benih unggul bersertifikat (ton)	30	6.115.155.000	5	67.867.150	5	48.730.500	-	62.920.200	5	6.185.034.130	5	247.297.030	16,67	4,04
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan (Varietas)	4	3.040.400.000	3	43.210.000	3	31.000.000	67	33.398.000	4	39.901.680	4	116.509.680	100,00	3,83

	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya	4	3.074.755.000	3	24.657.150	3	17.730.500	67	29.522.200	2	-	2	54.179.350	0,00	1,76
	3. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumber dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Peningkatan produksi ternak (ton)	10.230	24.554.198.500	1.690	969.382.719	1690	1.370.000.000	-	102.128.400		-		189.369.300	0,00	0,77
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota	1. Jumlah bantuan ternak yang diserahkan ke masyarakat	8.576	24.554.198.500	1.414	969.382.719	1.420	1.370.000.000	-	102.128.400		-		1.071.511.119	0,00	4,36
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	1. JUT: 50 Km 2. Dam parit: 35 unit 3. JITUT ; 100 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH: 1 unit 7. BPTHPT: 1 unit	4.145.384.000	1. JUT: 9 Km 2. Dam parit: 2 unit 3. JUTUT ; 22 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH: 1 unit 7. BPTHPT: 1 unit	2.414.920.250	1. JUT: 10 Km 2. Dam parit: 15 unit 3. JUTUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH: 1 unit 7. BPTHPT: 1 unit	3.699.131.750	-	1.904.488.154	1. JUT: 7 Km 2. Dam parit: 15 unit 3. JUTUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH: 1 unit 7. BPTHPT: 1 unit	5.845.089.750	1. JUT: 7 Km 2. Dam parit: 15 unit 3. JUTUT ; 20 Km 4. BPP: 11 unit 5. Puskesmas: 7 unit 6. BBTPH: 1 unit 7. BPTHPT: 1 unit	10.164.498.154	1.95% 2. 63% 3. 35% 4. 5. 100% 6. 100% 7. 100%	245,20

	1. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	0,6	1.786.700.000	0,2%	56.236.250	0,2%	136.400.000	-	131.607.306	0,2%	441.137.200	0,2%	628.980.756	0,33	35,20
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan	Jumlah dokumen yang disusun	1	1.500.000.000			1	50.000.000	-	40.292.071	1 dokumen	375.000.000	1	415.292.071	100,00	27,69
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian	12	1.786.700.000	12	56.236.250	12	86.400.000	25	91.315.235	12 bulan	66.137.200	12	213.688.685	100,00	11,96
	2. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	120	2.358.684.000	20	2.358.684.000	20	3.562.731.750	10	1.772.880.848	20 paket	5.403.952.550	20	9.535.517.398	16,67	404,27
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab (Ha)	100	2.530.000.000	2	378.274.000	20	419.710.550	-	483.910.000	20 Km	1.316.632.500	20	2.178.816.500	20,00	86,12

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun (Km)	25	6.940.473.281	9	1.735.010.000	5	200.000.000	-	74.924.000	7 Km	3.937.320.050	7	5.747.254.050	28,00	82,81
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara	11	6.650.000.000	-	-	3	1.869.912.300	-	-	11 BPP	11 BPP	11	-	100,00	0,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara	11	6.956.722.500	-	-	3	1.073.108.900	-	1.214.046.848	15 unit	150.000.000	15 unit	1.364.046.848	2,35	19,61
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	3.773.259.125	55%	496.995.870	85%	515.966.500,0	47	563.872.314		4.037.185.975	55%	1.060.868.184	39,46	28,12
	Sapi	22.521		19.929		20.793		20.781	-			19.929	-	88,49	
	Kambing	16.138		14.056		14.750		14.801	-			14.056	-	87,10	
	Unggas	807.334		735.334		749.743		1.263.632	-			735.334	-	91,08	

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengendalian Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) (bulan)	12	725.234.625	12,0	147.473.620	12,0	89.220.500,0	25	189.644.350		-	9,0	337.117.970	75,00	46,48
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Jumlah pengendalian kejadian/jenis penyakit (kejadian)	5.261	725.234.625	5.261,0	147.473.620	5.261,0	89.220.500	40	189.644.350		-	4 THL 5.261 kejadian	337.117.970	39,99	46,48
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan Jasa Medik Veteriner	11,0	3.048.024.500	11,0	349.522.250	11,0	426.746.000	100	374.227.964		-	11,0	723.750.214	41,53	23,74
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah lokasi pelayanan kesehatan hewan	2	3.048.024.500	2	349.522.250	2	426.746.000	100	374.227.964		-		723.750.214	41,53	23,74
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		NA	-	55 THL 101 orang	-	NA	-	-	-	50 orang	-	55 THL 101 orang	-		

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih	1. 5% 2.5%	19.051.428.357	1. 1% 2.1 %	1.967.582.892	1. 1% 2.1 %	2.880.065.000	-	4.696.692.968	1. 1% 2.1 %	1.725.726.610	1. 1% 2.1 %	8.390.002.470		44,04
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11	19.051.428.357	11,0	1.967.582.892	11,0	2.880.065.000	11	4.696.692.968	11 BPP	1.725.726.610	11 BPP	8.390.002.470	50,00	44,04
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1. jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek	101,0	12.226.004.572	38,0	680.236.200	101,0	786.020.000	10	763.259.000	101 orang	1.319.838.280	55 THL 38 orang	2.763.333.480	50,00	22,60
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1. Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan	100,0	4.911.886.251	113,0	1.176.186.692	100,0	1.890.945.000	20	2.031.022.320	100 kelompok	100 kelompok	113 kelompok 13 THL	3.207.209.012	45,00	65,29
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1. Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan	12	1.913.537.534	12,0	111.160.000	12,0	203.100.000	25	1.902.411.648	12 bulan	405.888.330	12 bulan 17 THL	2.419.459.978	70,00	126,44

	5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas aparatur yang profesional	100%	52.477.396.935	100%	8.317.131.468	100%	8.295.451.862	25	8.560.631.235	100%	17.121.262.470	100%	30.425.987.701	75,00	57,98
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	320.138.000	100%	45.888.000	100%	48.840.000	2.000	53.517.800	100%	48.304.800	100%	147.710.600	75,00	46,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra Tahun 2022-2026; IKU Tahun 2022-2026; Renja Perubahan Tahun 2021;	42	320.138.000	7,00	45.888.000	7	48.840.000	57	53.517.800	7 Dokumen	48.304.800	7,00	147.710.600	75,00	46,14
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	46.511.146.555	100%	7.727.712.679	100%	7.747.032.902	3.000	7.768.227.862	2 Dokumen	6.502.018.690	100%	21.997.959.231	46,75	47,30

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79	45.422.898.555	79,00	7.569.932.679	79	7.547.272.902	100	7.562.492.862	100%	6.274.895.890	79 PNS	21.407.321.431	46,90	47,13
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	7	497.800.000	7,00	72.600.000	7	101.660.000	100	93.985.000	79 PNS	77.047.800	7 orang	243.632.800	38,79	48,94
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12	590.448.000	12,00	85.180.000	12	98.100.000	25	111.750.000	7 orang	150.075.000	12 bulan	347.005.000	42,79	58,77
	Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	1.315	452.850.000	1.315,00	51.872.000	1.315	55.210.000	-	65.545.000	12 Bulan	36.417.400	1.315 unit	153.834.400	44,99	33,97
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan	3	316.050.000	3,00	35.372.000	3	41.120.000	100	48.770.000	1.315 unit	23.160.000	3 THL	107.302.000	51,90	33,95
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2	136.800.000	2,00	16.500.000	2	14.090.000	100	16.775.000	3 THL	13.257.400	2 ASN	46.532.400	24,84	34,01

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	48	166.228.000	48,00	11.208.150	48	8.412.000	17	25.004.000	2 ASN	174.442.000	48 orang	210.654.150	99,80	126,73
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya	44	85.826.500	-	824.000	-	-	-	-	48 orang	-	0 orang	824.000		0,96
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	24	80.401.500	4,00	10.384.150	24	8.412.000	33	25.004.000	225 ASN	55.582.100	4 orang	90.970.250	99,80	113,14
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	1.242.140.800	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	187.419.650	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	192.541.960	1. 50% 2. 0% 3. 50%	290.093.989	44 orang	269.325.870	1. 100% 2. 1 paket 3.12 bulan	746.839.509	36,22	60,13
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1	16.450.000	1,00	1.950.000	1	8.742.000	50	6.292.000	4 orang	2.063.370	1 Paket	10.305.370	-	62,65

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan (paket)	1	461.127.800	1,00	76.110.600	1	52.292.960	50	102.302.900	1. 100% 2. 2 unit 3. 100 %	84.000.300	1 Paket	262.413.800	50,30	56,91
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (paket)	1	41.007.500	1,00	5.994.500	1	2.149.000	50	3.159.000	1 Paket	23.711.050	1 Paket	32.864.550	54,63	80,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan (paket)	1	155.295.500	1,00	25.295.500	1	13.060.000	50	15.250.000	1 Paket	15.530.000	1 Paket	56.075.500	39,43	36,11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	12	568.260.000	12,00	78.069.050	12	116.298.000	25	163.090.089	1 Paket	144.021.150	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	385.180.289	31,92	67,78
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD	77	341.678.380	2,00	12.678.380			-	20.150.000	1 Paket	341.678.380	2 Unit	374.506.760		109,61

	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	63	125.000.000	-	-			-	-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	125.000.000	-	125.000.000		100,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran(un it)	12	124.678.380	2,00	12.678.380			-	20.150.000	4 Unit	-	2 Unit	32.828.380		26,33
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)	6	92.000.000	-	-			-	-	2 Unit	92.000.000	-	92.000.000		100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor	100%	649.536.000	100%	75.846.478	100%	106.040.000	3.000	70.315.541	2 Unit	111.207.430	100%	257.369.449	26,42	39,62

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12	465.436.000	12,00	58.846.478	12	79.180.000	25	56.040.541	1 paket	75.394.100	12 Bulan	190.281.119	27,94	40,88
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor	1	184.100.000	1	17.000.000	1	26.860.000	50	14.275.000	100%	35.813.330	3 THL 1 Paket	67.088.330	21,97	36,44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	166	2.793.679.200	166	204.506.131	166	137.375.000	48	267.777.043	12 Bulan	314.730.750	166 Unit	787.013.924	41,81	28,17
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74	598.550.000	74	108.550.000	74	94.900.000	47	97.300.000	2 THL 1 Paket	146.100.000	74 unit 3 THL	351.950.000	45,89	58,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	74	401.795.000	4,00	62.527.131	74	33.955.000	43	110.917.043	166 Unit	105.820.750	74 unit	279.264.924	29,04	69,50

Lapangan															
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan (unit)	2	254.120.000	-	-			-	-	74 unit 3 THL	-	-	-		0,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan (unit)	90	95.000.000	-	-		-	-	-	74 unit	-	-	-		0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara	30	86.560.000	30,00	12.525.000	30	8.520.000	67	21.620.000	2 unit	23.130.000	30 unit	57.275.000	47,18	66,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi	6	271.053.800	1,00	20.904.000			-	37.940.000	30 unit	39.680.000	1 paket	98.524.000		36,35
	TOTAL		128.096.101.917		14.530.617.490		17.044.845.612	0	16.760.958.051		28.729.264.805		53.961.855.304		42,13

Hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan dalam pengentrian anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu.
2. Adanya keterlambatan pada penyusunan dan pengesahan anggaran dan anggaran perubahan sehingga mengakibatkan pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan kekurangan waktu untuk pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak kegiatan.
4. Kurangnya pengawasan terhadap tanggal kadaluarsa benih sehingga benih yang diterima petani ada yang sudah expire.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Meningkatkan pengawasan kelapangan bersama BPSB dalam pemeriksaan benih
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan sektor pertanian. Dengan indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Secara garis besar kinerja pelayanan Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terkait dengan pelaksanaan urusan penunjang bidang pertanian telah mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini memang disadari bahwa dalam perencanaan awal diberikan target yang tidak begitu maksimal.

Tabel 2.2.1 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	SPM/ Standar Nasional	Target			Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
			2021	2022	2023	2021	2022	2024	2025	
1.	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura		(6,67)	5,13	41,53	(5,50)	(18,50)	1,07	1,86	
	Padi		114.980	117.343	2	109.883	95.753	121.230	123.654	
	Jagung		265.551	283.005	119.980	271.047	222.855	290.081	294.897	
	Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya									
	Padi		4,65	4,70	4,8	4,80	4,90	4,8	4,9	
	Peningkatan produksi komoditas Tanaman									
	Cabai (Ton)		9.726	9.896	10.069	5.689	5.223	10.245	10.425	
	Jeruk (Ton)		9.718	9.888	9.892,00	10.198	7.027	10.065	10.241	
	Alpukat (Ton)		2.896	3.396	3.896	11.054	12.618	4.396	4.896	
2.	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :		1,98	1,94	1,9	1,98	1,94			Pindah ke Dinas Perkebunan
	Sapi		20.229	20.529	20.829	20.360	20.781	-	-	
	Kambing		14.266	14.476	14.686,00	13.887	14.801	-	-	
	Unggas		735.334	749.743	764.134	1.188.499	1.263.632	-	-	
3.	Peningkatan nilai SAKIP		B (65)	B (68)	BB (71)	B (65)	BB (70)	BB (73)	BB (75)	
	Level Maturitas SPIP		2,11	2,35	2,5	2,11	2,35	3	>2,6	
	Jumlah Temuan BPK		7	6	5	6	4	4,0	3,0	

Capaian kinerja pelayanan DTPHP tahun 2021 dan 2022 terjadi penurunan produksi beberapa komoditi salah satunya padi dimana penurunan produksi padi, dari 109.883 ton pada Tahun 2021 menjadi 95.390 ton pada Tahun 2022. Penurunan ini sejalan dengan penurunan luas tanam komoditi padi, dari 22.956 hektar pada Tahun 2021 menjadi 19.906 hektar pada Tahun 2022. Penurunan produksi maupun luas tanam disebabkan oleh sejumlah permasalahan, antara lain terdapat bendungan di kecamatan gunung tuleh yang baru dibangun oleh PU melalui dana IPDMIP rusak kembali setelah hujan lebat. Selain itu di kecamatan talamau jaringan irigasi juga banyak yang rusak karena gempa tanggal 25 Februari 2022 sehingga petani ada yang beralih menanam komoditi lain.

Selain itu produksi jagung juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena petani Kabupaten Pasaman Barat fanatik dengan benih pioner 32 dimana saat itu benih tersebut langka di pasaran dan harga pupuk pun mahal. Petani tidak menanam lahannya sampai benih tersedia kembali. Selain itu jagung yang berintegrasi dengan sawit sudah tidak bisa ditanami lagi karena sawitnya sudah berumur lebih dari 2 tahun.

Untuk komoditi hortikultura seperti cabe mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2021 hal ini disebabkan karena cuaca yang ekstrim (sering hujan) menyebabkan OPT cabe berkembang seperti lalat buah, ulat grayak, layu cendawan dan thrips sehingga cabe sehingga produksi sedikit menurun. Harga cabe menjadi mahal dipasaran yang menjadi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Dalam rangka pengendalian inflasi di Kabupaten Pasaman Barat terdapat kegiatan bantuan bibit cabe, pupuk dan

pestisida namun pendropingan dilakukan sudah di akhir tahun sehingga untuk produksinya masuk ketahun 2023.

Dari komoditas peternakan pada umumnya meningkat dari tahun sebelumnya seperti sapi terjadi peningkatan padahal kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sedang mewabah hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran sapi dan kambing tinggi kemudian tahun 2021 juga ada bantuan sapi (32 ekor), kambing (32 ekor) dan unggas (1.350 ekor). Dalam pengendalian PMK langsung ditindaklanjuti dengan penutupan pasar ternak dan pengobatan secara intens oleh petugas terhadap ternak yang terkena PMK.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan salah satu yang menjadi penghambat adalah adanya alih fungsi lahan. Guna menghambat laju konversi lahan sawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sudah mengeluarkan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Nomor 9 Tahun 2016.

Pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan sebagai komoditi andalan dan unggulan di Propinsi Sumatera Barat dalam penetapannya diatur oleh Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 521-849-2019 Tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan ditindaklanjuti juga dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.46/204/DTPHP-III/2021 Tentang Penetapan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Pasaman Barat, maka sentra-sentranya meliputi :

- a) Kawasan Tanaman pangan

- Padi meliputi Kec. Talamau, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang dan Kec. Ranah Batahan
- Kawasan jagung meliputi Kec. Pasaman, Kec. Luhak Nan Duo, Kec. Kinali, Kec. Lembah Melintang
- Kawasan ubi jalar meliputi Kec. Talamau

b) Kawasan Hortikultura

- Kawasan jeruk meliputi Kec. Pasaman dan Kec. Lembah Melintang
- Kawasan sayur lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo
- Kawasan aneka cabai meliputi Kecamatan Talamau
- Kawasan buah lainnya meliputi Kec. Luhak Nan Duo (alpukat)
- Kawasan manggis meliputi Kec. Talamau, Gunung Tuleh dan Pasaman

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Masih maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, menyebabkan luas budidaya pertanian semakin berkurang.
- b. Kuantitas penggunaan benih unggul bersertifikat oleh petani masih kurang, sehingga produktivitas kurang meningkat.
- c. Belum banyak kelompok tani yang dapat mengimplemtasikan manajemen kelembagaan tani secara optimal.
- d. Sebagian petani belum mampu merubah mindset (perilaku) untuk lebih maju karena kurangnya penguasaan teknologi terutama teknologi informasi.
- e. Sarana irigasi belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk menjamin ketersediaan air untuk menunjang usaha budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- f. Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan pertanian perkotaan, dirasakan masih kurang dimana hanya beberapa orang yang aktif berperan. Selain itu dukungan dari pemangku wilayah dan tokoh-tokoh masyarakat setempat belum optimal untuk mendorong warga mengembangkan pertanian di wilayahnya.

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat, visi dan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura maka isu-isu strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM pertanian melalui penguatan kelembagaan petani dan penyuluh
2. Peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian
3. Peningkatan pendapatan petani melalui nilai tambah pertanian
4. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura
5. Pengendalian serangan OPT dan dampak bencana
6. Alih fungsi lahan sawah ke komoditi lainnya dan konversi lahan pertanian
7. Optimalisasi pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal.

Untuk itu, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif dan efisien memfokuskan Faktor-faktor kunci antara lain berupa potensi, peluang, kekuatan, dan tantangan yang dihadapi termasuk sumber daya, dana, sarana, dan prasarana serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang digunakan. Selain berkoordinasi dengan seluruh stakeholders terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/ Kementerian

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.
- b. Infrastruktur pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum optimal.
- c. Pengamanan produksi dari gagal panen akibat bencana dan serangan OPT.
- d. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum sesuai anjuran.
- e. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap petani dalam pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- f. Semakin terbatasnya tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
- g. Kurangnya jumlah SDM.
- h. Masuknya komoditas pertanian impor yang menyaingi produk petani.
- i. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.
- j. Laju alih fungsi lahan pertanian ke non sektor pertanian semakin mengkhawatirkan.
- k. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik lokal

Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Provinsi Sumatera Barat.
- b. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurangi beban APBD Provinsi dan Kabupaten.
- c. Adanya usaha pengamanan produksi (asuransi padi dan sapi) dari pemerintah akibat gagal panen dampak serangan OPT dan bencana.
- d. Pengembangan pupuk organik, agensi hayati, pestisida nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida melalui sekolah lapang.
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta keterampilan petani melalui bimtek, kursus, magang dan sekolah lapang yang sudah banyak dilaksanakan melalui kegiatan IPDMIP.
- f. Modernisasi pertanian melalui penggunaan alat tepat guna untuk mengantisipasi semakin berkurangnya minat tenaga kerja produktif pada sektor pertanian.
- g. Optimalisasi lahan melalui intensifikasi pertanian, pemantapan sapa usaha tani dan mendorong dilaksanakannya peraturan tentang tata ruang dan lahan pertanian berkelanjutan (Perda LP2B sudah ada).
- h. Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi plasma nutfah kacang tanah dan padi gogo

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah:

1. Untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura bisa dilakukan secara intensifikasi dengan

melakukan beberapa hal seperti melakukan pemupukan, ketersediaan air cukup, melakukan pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman, pemakaian bibit unggul, pengolahan tanah yang baik.

2. Dalamantisipasi konversi lahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat sudah membuat perda LP2B tahun 2016 namun kondisi lahan saat ini sudah jauh berbeda maka dilakukan updating peta LP2B kemudian tahun 2023 dianggarkan dana untuk revisi perda. Diharapkan dengan adanya perda dapat diterapkan sehingga tidak terjadi lagi alih fungsi lahan.
3. Penyuluh diharapkan dapat merubah mindset petani untuk mau melakukan minimal 2x tanam dalam setahun hal ini dapat meningkatkan produksi. Untuk menarik minat petani perlu diadakan acara2 ceremonial dengan menghadirkan Bupati/Pejabat lainnya. Misalnya dengan memberikan reward/doorprize kepada petani.
4. Setiap kecamatan hendaknya menggali potensi atau menetapkan satu komoditi unggulan yang berkelanjutan sehingga perangkat daerah dapat mengintervensi dana untuk melengkapi sarana dan prasarana serta pemasarannya. Namun pelaksanaannya harus sudah dimulai dari masyarakat itu sendiri.
5. Perlu adanya pendataan petani/buruh tani yang belum tergabung dalam kelompok tani karena sasaran bantuan adalah kelompok tani. Karena umumnya petani miskin adalah buruh tani sehingga butuh penanganan khusus dengan memberikan keahlian/sarana.
6. Memperbanyak penyuluh swadaya (berasal dari petani) sebagai kader penyuluh yang sudah dibekali keahlian sehingga dalam penanganan awal terhadap hama penyakit tanaman serta

penyakit hewan sehingga jika ada kejadian penanganannya cepat diatasi saat petugas tidak ditempat.

7. Untuk melestarikan sumber daya genetik lokal perlu adanya keberlanjutan kegiatannya khususnya yang sudah ada pelepasan varietas seperti Kacang Tigo Ampek, Padi Sigudang dan Alpukat Giri Maju.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 24.543.385.658,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) tahun 2024. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.2 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Pasaman Barat

Nama OPD: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				24.543.385.658					24.538.385.658	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.679.323.416	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.674.323.416	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	60.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen	55.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79 PNS	7.820.763.416	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	79 PNS	7.820.763.416	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2 orang	80.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN penatausahaan BMD	2 orang	80.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	4 orang	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	4 orang	45.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	186.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	186.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	2 unit	69.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	2 unit	69.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	103.150.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	12 bulan	103.150.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74 unit	315.410.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	74 unit	315.410.000	

2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	"1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	5.395.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	"1. % ketersediaan bibit temak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman perkebunan (6 komoditas: sawit, kopi robusta, kopi arabika, nilam, kelapa hibrida, pinang) 4. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 5. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	5.395.000.000	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasbar	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12 bulan	3.595.000.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kab. Pasbar	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12 bulan	3.595.000.000	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	4 varietas	1.800.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	4 varietas	1.800.000.000	
3.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITU: 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	6.927.250.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITU: 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	6.927.250.000	
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	1 dokumen	650.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	1 dokumen	650.000.000	
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	22 paket	6.277.250.000	Pembangunan Prasarana Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	22 paket	6.277.250.000	
5.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	220.500.000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Kab. Pasbar	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	220.500.000	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	150 orang	220.500.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kab. Pasbar	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	150 orang	220.500.000	
6.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh	1-1 %	3.321.312.242	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kab. Pasbar	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh	1-1 %	3.321.312.242	
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11 BPP	3.321.312.242	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kab. Pasbar	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	11 BPP	3.321.312.242	
					24.543.385.658						24.538.385.658

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat mengalokasikan dana sebesar Rp. 24.543.385.658,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) tahun 2024 dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sesuai Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan RPJMD Periode 2021-2026. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan, maka kebutuhan anggaran tidak ada perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Dalam menyusun Renja tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat memperhatikan usulan program dan kegiatan yang diperoleh dari para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, serta dari berbagai informasi dalam pelaksanaan musrenbang. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang dirangkum dapat dilihat dalam Tabel 2.4

Tabel 2.3. (T-C. 32)
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2023
Berdasarkan Hasil Musrenbang

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Usulan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1					2	3	4	5	6
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1 . % ketersediaan bibit ternak 2. % ketersediaan bibit/ benih Hijauan Pakan ternak 3. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas:padi, jagung) 4. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat)		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		
					Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor, Cornsheller, Thresher, Sprayer, Rice Transplanter, Combine Harvester, dll)	Talamau		2 unit	Handtraktor
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)		
					Pengadaan dan Pelatihan Pupuk Organik	Lembah Melintang		1 paket	Pupuk
					Bantuan Benih Cabe	Talamau		1 paket	Benih Cabe
					Bantuan Benih Jagung	Talamau		1 paket	Benih Jagung

3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah infastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun		
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)		
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kinali	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	1 unit	Rehab Irigasi
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah jalan usaha tani yang dibangun		
					Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Talamau	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	1 paket	JUT
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih		
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian		
3	27	07	2.01	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah pelaksanaan sekolah lapang (kali)		
					Pelatihan Petani/Peternak	Kinali		1 paket	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Tahun 2020-2024 merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Adapun sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan prioritas pembangunan Propinsi terletak pada program dan kegiatan yang diusulkan melalui aplikasi “Sakato Plan” sedangkan untuk Dana Tugas Pembantuan dapat diusulkan melalui e-Proposal dan kegiatan DAK Penugasan melalui aplikasi e-Krisna. Sinkronisasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1.

Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian, Provinsi dan Kabupaten

NO	KEMENTERIAN PERTANIAN		DINAS TANAMAN PANGAN HORITKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN PASAMAN BARAT	
	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota
		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

		Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian				Pembangunan Prasarana Pertanian
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berdasarkan misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2024, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan sektor tanaman pangan hortikultura dan peternakan			PDRB per Kapita ADHB sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan (Rp.juta)	36,17	37,71	39,33	41,53	43,22	45,46	36,17
			1. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura	% Peningkatan/Penurunan produksi komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura		(6,67)	5,13	1,86	1,07	1,86	1,82
				Padi	147.471	114.980	117.343	119.980	121.230	123.654	126.007
				Jagung	262.510	265.551	283.005	287.556	290.081	294.897	299.752
				Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya							
				Padi	4,60	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
				Peningkatan produksi komoditas Tanaman Hortikultura (Ton):							
				Cabai (Ton)	9.558	9.726	9.896	10.069	10.245	10.425	10.607
				Jeruk (Ton)	9.718	9.718	9.888	9.892	10.065	10.241	10.420
				Alpukat (Ton)	2.396	2.896	3.396	3.896	4.396	4.896	5.396
			2 Meningkatnya populasi ternak	% Peningkatan/Penurunan populasi komoditas ternak :	-1,81	1,98	1,94	1,90	1,86	1,83	1,80
				Sapi	19.929	20.229	20.529	20.829	21.129	21.429	21.429
				Kambing	14.056	14.266	14.476	14.686	14.896	15.106	15.316
				Unggas	720.934	735.334	749.743	764.134	778.534	792.934	807.334
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DTPHP			Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2
			1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DTPHP	Peningkatan nilai SAKIP	B (62)	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)	BB (78)
				Level Maturitas SPIP	1,98	2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
				Jumlah Temuan BPK	8	7	6	5	4	3	2

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 5 (Lima) Program yang terdiri dari 14 (Delapan belas) Kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan.

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pangan
		Jumlah Produksi Hortikultura (ton) komoditas:
		Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lokal lainnya
		Persentase ketersediaan bibit ternak
		Persentase ketersediaan bibit/benih hijauan pakan ternak
	1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah sarana pertanian yang dibantu (unit)
	1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Frekuensi pengawasan sarana pendukung pertanian
	2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
	2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah benih unggul bersertifikat
	3 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan
	4 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah varietas yang meningkat kualitasnya
	5 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah varietas yang dimanfaatkan SDG nya
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun
	3. Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)
	6 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	Jumlah dokumen yang disusun
	7 Penyusunan peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B,	Jumlah dokumen yang disusun
	8 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
	4. Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)
	9 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab

	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun
	11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah dam parit yang dibangun
	12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara
	13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)
	5.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	14	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT
	15	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jumlah petani yang mendaftar Asuransi Usaha Tanaman Pangan (AUTP) (Ha)
4.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Persentase peningkatan kelas kelompok tani 2. Persentase penyuluh dan petani terlatih
	6.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian
	16	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah penyuluh yang mengikuti diklat/bimtek
	17	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pengembangan kelembagaan
	18	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Frekuensi penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan
	19	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah lapang yang diselenggarakan
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah
	7.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran
	20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, PK, RKA, RKA Perubahan), buku database
	21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)
	8.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan
	22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan

	23 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran
	24 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan
	9. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola
	25 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan administrasi dan pengamanan BMD pada DTPHP
	26 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD
	10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek
	27 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
	28 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya
	29 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai
	11. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran 2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 3. Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah
	30 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor
	31 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang dibutuhkan
	32 Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan
	33 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan
	34 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang diikuti Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti
	12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan BMD
	35 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel
	36 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran
	37 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa layanan penunjang urusan kantor
	38 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor
	39 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3 Jumlah penyediaan Jasa pembersihan landscape kantor

	14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara
	40 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas pemeliharaan kendaraan
	41 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
	42 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang akan dilakukan pemeliharaan
	43 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang mendapat pemeliharaan
	44 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat elektronik penunjang operasional administrasi perkantoran yang dipelihara
	45 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yang dipelihara/direhabilitasi

Dalam merumuskan program/kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Perumusan program dan kegiatan harus berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Program dan kegiatan harus mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pasaman Barat yang dijabarkan dalam program-program prioritas Bupati Pasaman Barat
3. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis, diantaranya peningkatan SDM pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 program, yang terdiri dari 1 program penunjang

(program pada setiap perangkat daerah/eks-rutin) dan 4 program pelaksanaan (eks-pembangunan).

2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 14 kegiatan yang dijabarkan dalam 45 sub kegiatan.
3. Terdapat 1 sub kegiatan yang terkait Pengarusutamaan Gender yaitu sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Kegiatan tersebut secara eksplisif dilaksanakan untuk menjawab isu gender yang ada di bidang pertanian dimana peran serta perempuan dalam kegiatan usaha tani maupun dalam kelembagaan tani masih rendah. Diharapkan melalui kegiatan-kegiatan ini peran serta wanita dalam pembangunan pertanian dapat meningkat, ditunjukkan dengan bertambahnya kelompok wanita tani dan meningkatnya jumlah wanita yang tergabung dalam kelembagaan tani.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 24.489.323.658,- (*Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) tahun 2024 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun rencana program kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Fokus pada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja; tertib administrasi dan pelaporan keuangan; serta sarana dan prasarana aparatur.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Fokus kegiatan pada peningkatan sarana pertanian untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD

maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu jumlah produksi tanaman pangan sebesar 411.311 Ton dan hortikultura sebesar 24.199 ton.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Fokus diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian. Kegiatan ini untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/terbangun.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Fokus pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian sebesar 10% (pertanian) dan 8% (peternakan).
5. Program Penyuluhan Pertanian Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan pertanian baik kelembagaan petani maupun kelembagaan penyuluh. Peningkatan kapasitas petani juga diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda di sector pertanian. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung target program RPJMD maupun Renstra pada tahun 2024 yaitu Persentase peningkatan kelas kelompok tani dan penyuluh sebesar 1%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Pasaman Barat serta Renstra tahun 2021-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, DAK, dll) yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 5 (Lima) program yang terdiri dari 14 (Empat belas) kegiatan dan 45 (Empat puluh lima) Sub Kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp.24.543.385.658,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah*) tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 (T-C. 33)
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

Nama OPD: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat

No	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Hasil Analisis Kebutuhan 2025		
			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								24.543.385.658			26.986.424.224
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						8.679.323.416			9.535.955.758
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan						60.000.000			66.000.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah dokumen perencanaan DTPHP yang disusun (Dokumen Renstra, Renja, RTP, DPA, DPA Perubahan)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	5 dokumen	7 dokumen	55.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60.500.000
02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pasbar	Jumlah dokumen evaluasi kinerja OPD yang disusun (Dokumen LKPJ-LPPD, LAKIP)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	100 %	12 laporan	7 dokumen	5.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.820.763.416			8.602.839.758
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	79 PNS	79 orang	7.642.763.416	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	8.407.039.758
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	7 orang	79 orang	83.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	91.300.000

03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah PNS yang mendapat gaji dan tunjangan	100 %	12 bulan	79 orang	95.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	104.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									80.000.000			88.000.000
01	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	100 %	1 dokumen	2 orang	55.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	60.500.000
02	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN penatausahaan BMD	100 %	4 laporan	2 orang	25.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	27.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									45.000.000			38.500.000
01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	225 ASN	4 orang	10.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	-
02	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	44 orang	4 orang	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Pegawai	100 %	4 orang	4 orang	15.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah									186.000.000			204.300.000
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	3.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.000.000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	50.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	7.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7.700.000

04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	1 paket	12 bulan	26.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.600.000
05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	Frekuensi pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	12 bulan	12 bulan	100.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	110.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									69.000.000			75.900.000
01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	26.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.600.000
03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin penunjang administrasi perkantoran	100 %	2 unit	2 unit	23.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25.300.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									103.150.000			113.465.000
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	12 laporan	12 bulan	50.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	4 laporan	12 bulan	33.150.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	36.465.000
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air untuk operasional kantor	100 %	4 laporan	12 bulan	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								315.410.000			346.951.000
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	3 unit	77 unit	100.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	110.000.000
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	74 unit	77 unit	65.205.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	71.725.500
03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	2 unit	77 unit	65.205.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	71.725.500
04	Pemeliharaan Mebel	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	30 unit	77 unit	20.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	22.000.000
05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	30 unit	77 unit	15.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	16.500.000
06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pasbar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (unit)	Jumlah kendaraan dinas yang akan dilakukan pemeliharaan dan pembayaran pajak/KIR	100 %	1 paket	77 unit	50.000.000	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								5.395.000.000			5.934.500.000
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								3.595.000.000			3.954.500.000
01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (laporan)	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 laporan	12 bulan	2.000.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	2.200.000.000

02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	Frekuensi pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 laporan	12 bulan	1.595.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1.754.500.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota									1.800.000.000			1.980.000.000
01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (VUB)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	3 VUB	3	600.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	660.000.000
02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 dokumen	3	500.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	550.000.000
03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Pasbar	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Jumlah plasma nutfah yang dilestarikan	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	1 dokumen	3	700.000.000	1. Jumlah produksi tanaman pangan (2 komoditas: padi, jagung) 2. Jumlah produksi hortikultura (komoditas: cabe, jeruk Alpukat) "	121.230, 290.081, 9.738, 10.065, 4.396 ton	770.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN									6.927.250.000			7.619.975.000
Pengembangan Prasarana Pertanian									650.000.000			715.000.000
01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dokuman)	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1 dokumen	0,20%	350.000.000	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	385.000.000
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (laporan)	Persentase Peningkatan Indeks Pertanaman (%)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	12 laporan	0,20%	300.000.000	Jumlah infrastruktur pertanian yang terpelihara/ terbangun	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	330.000.000

Pembangunan Prasarana Pertanian									6.277.250.000			6.904.975.000
01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	Jumlah Jaringan Irigasi usaha tani yang direhab	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	6 paket	22 paket	1.200.000.000	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1.320.000.000
02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	12 paket		2.000.000.000	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	2.200.000.000
03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah dam parit yang dibangun	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	5 paket		1.000.000.000	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1.100.000.000
04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan di Kecamatan yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibagun/diperbaiki (paket)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	3 paket		1.500.000.000	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (unit)	JUT: 8 Km, Dam parit:15 unit, JITUT ; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1 unit	1.650.000.000

05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/dipelihara	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun/diperbaiki (paket)	0,01,0 Km, Dam parit:15 unit, JIUT; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1	2 paket		577.250.000	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0,01,0 Km, Dam parit:15 unit, JIUT; 20 Km, BPP: 11 unit, BBTPH:1 unit, BPTHPT:1	634.975.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									220.500.000			242.550.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									220.500.000			242.550.000
01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	10,10,8 %	520 ha 50 Orang	50 orang	140.000.000	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	154.000.000
02	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (laporan)	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengendalian OPT	10,10,8 %	520 ha 50 Orang	50 orang	80.500.000	% fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (Perkebunan, pertanian, peternakan)	10,10,8 %	88.550.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									3.321.312.242			3.653.443.466
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									3.321.312.242			3.653.443.466
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	101 orang	11 BPP	2.200.000.000	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	2.420.000.000
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	100 kelompok	11 BPP	521.312.242	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	573.443.466
03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	12 bulan	11 BPP	400.000.000	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	440.000.000
04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota		1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (unit)	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian	1-1 %	12 bulan 17 THL	11 BPP	200.000.000	1. % Peningkatan Kelas Kelompok Tani 2. % Penyuluh dan petani yang terlatih	1-1 %	220.000.000
									24.489.385.658			26.927.024.224

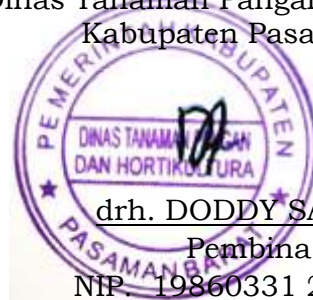
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat disusun sebagai pedoman operasional Program Kegiatan Tahun 2024 dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 dengan berdasarkan Evaluasi Program Kegiatan tahun-tahun lalu sebagai dasar untuk menentukan strategi teknis kedepan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan peternakan untuk menuju kedaulatan pangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Tentu saja, keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja ini sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan upaya koordinasi yang lebih intense antar semua pihak sehingga program dan kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik.

Rencana Kerja ini bersifat indikatif sehingga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan aturan atau kebijakan yang baru sesuai dengan peraturan yang ada sehingga diharapkan perubahan yang terjadi membuat Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat menjadi lebih sempurna sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Sukomananti, 2023
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Pasaman Barat



drh. DODDY SAN ISMAIL, MM

Pembina /IV.a

NIP. 19860331 201101 1 001